

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kepala Sekolah

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan “sekolah”. Kata kepala dapat diartikan “ketua atau “pemimpin” dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan kata “sekolah” dimaknai sebagai sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pembelajaran. Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab di lembaga pendidikan.¹

Menurut KBBI kepala sekolah adalah orang tua atau guru yang memimpin suatu sekolah. Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah seseorang atau guru yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga sekolah. Menurut Wahjosumijdo mengemukakan bahwa pengertian kepala sekolah adalah sebagai tenaga profesional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar/ tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.²

Wahdjosumidjo, mendefinisikan kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana

¹Piet A. Sahertian, *Profil Pendidik Profesional*, (Yogyakarta, Andi offset, 1994) 8.

²Basri, "Manajemen Kepala Sekolah Dalam Mewujudkan Sekolah Adiwiyata", *Jurnal al-Fikrah*, Vol. V, No. 1 Januari-Juni 2017, 105.

terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dengan murid yang menerima pelajaran. Sedangkan menurut Daryanto, kepala sekolah merupakan personel sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatankegiatan sekolah.

Dengan begitu kepala sekolah dapat diartikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu lembaga pendidikan yang mana diselenggarakannya proses belajar mengajar, tempatdimana terjadi interaksi anantara pendidik dan peserta didik.

Menurut Raflis Kosasi dalam Soetjipto, pada dasarnya kepala sekolah melakukan tiga fungsi sebagai berikut yaitu: membantu para guru memahami, memilih, dan merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai, menggerakkan para guru, para karyawan, para siswa, dan anggota masyarakat untuk mensukseskan program-program pendidikan di sekolah, menciptakan sekolah sebagai lingkungan kerja yang harmonis, sehat, dinamis, nyaman sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan penuh produktivitas dan memperoleh kepuasan kerja yang tinggi.³

Kepala sekolah otomatis dianggap sebagai pemimpin lembaga pendidikan, dengan demikian diharapkan mampu mengembangkan serta menyalurkan pikiran seluiruh guru maupun staf lain sehingga dapat tercipta suasana kerja yang efektif dan efisien. Kepala sekolah merupakan pemimpin bagi sekolah, yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan sekolah serta memiliki tugas mengelola seluruh sumberdaya

³ Soetjipto, dkk, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta,2009),44.

sekolah. Soetopo dan Soemanto menyatakan bahwa tugas kepala sekolah terbagi menjadi dua, pertama, tugas yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, kedua, tugas yang berkaitan dengan menciptakan suasana belajar yang sehat. Membangun kerjasama tim yang baik serta kompak juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk membantu kelancaran tercapainya tujuan kerjasama. Dapat dikatakan bahwa seorang kepala sekolah adalah seorang yang sangat bertanggung jawab dan memiliki peranan cukup besar dalam meningkatkan mutu sekolah.

Profesionalisme guru tidak akan ada atau berjalan mulus tanpa adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah, sebab salah satu di antara cara guru agar bisa menjadi guru profesional adalah dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu guru.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya kepala sekolah adalah bentuk usaha dan do`a yang dilakukan oleh seseorang yang memimpin orang-orang yang ada di dalam sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan memecahkan persoalan, mencari jalan keluar yang terdapat disekolah yang dipimpinnya.

1. Kewajiban Kepala Sekolah

Dalam UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, sehingga dengan demikian Kepala Sekolah mempunyai kewajiban untuk selalu mengadakan

pembinaan dalam arti berusaha agar pengelolaan, penelitian, bimbingan pengawasan dan pengembangan pendidikan dapat terlaksana.⁴ Berikut penjelasannya;

a. Pengelolaan

Merupakan suatu proses yang mana dasar dari kegiatan ini meliputi pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, tanah, gedung serta pemilikannya.

b. Penilaian

- 1) Penilaian pendidikan dasar diselenggarakan untuk memperoleh keterangan tentang proses belajar mengajar dan upaya pencapaian tujuan pendidikan dasar dalam rangka pembinaan dan pengembangan, serta untuk penentuan akreditasi pendidikan dasar yang bersangkutan.
- 2) Penilaian sekolah menengah dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka.

Tujuan penilaian pada dasarnya untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga pendidik. Serta dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi sekolah menengah yang bersangkutan.

c. Bimbingan

⁴Wahjosumijo, Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Raja Grafindo, 1999. Hlm. 203.

Merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh para pendidik dalam upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan.

d. Pembiayaan

Meliputi gaji pendidik, tenaga administrasi, biaya pengadaan pemeliharaan sarana prasarana dan biaya pengembangan.

e. Pengawasan

Dilaksanakan dalam rangka pembinaan pengembangan, pelayanan dan peningkatan mutu, serta perlindungan sekolah yang bersangkutan, meliputi segi teknis pendidikan dan administrasi sekolah yang bersangkutan.

f. Pengembangan

Pengembangan meliputi upaya perbaikan, perluasan dan penyesuaian pendidikan melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun peralatannya. Kegiatan pengembangan dilaksanakan dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah.

2. Standard Kualifikasi Kepala Sekolah

Standard kualifikasi Kepala Sekolah telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 bahwa kualifikasi kepala sekolah terdiri atas kualifikasi umum dan khusus yakni:

a) Kualifikasi umum kepala sekolah meliputi:

- Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma (D-4) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang berakreditasi
- Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun
- Memiliki pengalaman mengajar sekurang kurangnya selama 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun di TK.
- Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

b) Kualifikasi khusus kepala sekolah Menengah Pertama (SMP) meliputi:

- Berstatus sebagai guru SMP
- Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP
- Memiliki sertifikat kepala SMP yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.

3. Tugas Dan Fungsi Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan seorang atasan yg diutus/dipilih untuk memimpin, dipihak lain kepala sekolah juga adalah wakil

pendidik dan staf. Sebagai seorang atasan yang telah ditunjuk, kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai tangan kanan atasan untuk membina sekolah, dan sebagai wakil pendidik, kepala sekolah harus mampu menerjemahkan serta menyampaikan aspirasi mereka. Kepala sekolah mengembangkan tugas pokoknya yaitu membina atau mengembangkan sekolahnya secara terus menerus sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Terdapat 3 jalan yang perlu dilaksanakan kepala sekolah, antara lain:⁵

a. Pembinaan sarana dan prasarana administratif

Dalam meningkatkan mutu sekolah, kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah, misal gedung, perlengkapan dan peralatan, keuangan, sistem pendataan/pencatatan, kesejahteraan, dan lainnya yang tercakup dalam bidang administrasi pendidikan. Selaku administrator, kepala sekolah berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah.⁶

b. Pembinaan staf dalam kemampuan profesinya

Usaha peningkatan mutu dapat juga dilakukan dengan cara meningkatkan mutu para pendidik dan seluruh staf sekolah, misalnya melalui rapat, seminar, pelatihan, observasi kelas,

⁵Soewardji Lazaruth, *kepala sekolah dan tanggung jawabnya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000) 20.

⁶Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989) , 90.

perpustakaan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, dapat dikatakan kepala sekolah memiliki fungsi sebagai supervisor pendidikan.

c. Pembinaan diri sendiri dalam kepemimpinannya

Masalah kepemimpinan juga merupakan factor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu dapat berjalan baik apabila pendidik bersikap terbuka, kreatif dan memiliki semangat etos kerjayang tinggi.

Untuk menciptakan suasana kerja yang menyenangkan serta produktif ditentukan oleh sifat dan bentuk kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Karena itu kepala sekolah perlu untuk terus berusaha mengembangkan diri agar kepemimpinannya terus berkembang pula. Hal ini merupakan kewajiban yang berperan penting karena fungsinya sebagai pemimpin pendidikan.⁷ Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah bertugas mewujudkan hubungan yg harmonis dalam rangka membina dan mengembangkan kerja sama antar personal, agar serempak bergerak kearah pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.⁸

Berikut tugas pokok kepala sekolah berdasarkan bidangnya:

- a. Bidang akademik yang berkenaan dengan proses belajar mengajar di dalam sekolah.

⁷Lazaruth, Kepala Sekolah., 21.

⁸Nawawi, Organisasi Sekolah., 90.

Menyusun program semester dan program tahunan termasuk juga pembagian tugas mengajar, mengatur pelaksanaan penyusunan model satuan pelajaran dan pembagian waktu yang digunakan, mengatur pelaksanaan evaluasi belajar, mengatur norma penilaian dan norma kenaikan tingkat/kelas, mengatur usaha-usaha peningkatan perbaikan pengajaran.

b. Bidang ketatausahaan dan keuangan sekolah.

Menyelenggarakan surat menyurat, mengatur penerimaan uang, mengelola penggunaan keuangan, mempertanggung jawabkan keuangan.

c. Bidang kesiswaan.

Mengatur penerimaan murid berdasarkan peraturan penerimaan murid baru, mengatur program bimbingan dan penyuluhan, mengatur mutasi siswa.

d. Bidang personalia/kepegawaian.

Menginventarisasi personalia, mengusulkan formasi pendidik dan merencanakan pembagian tugas-tugas pendidik termasuk menghitung beban kerja pendidik, mengusulkan pengangkatan, kenaikan gaji, perpindahan pendidik dan administrasi kepegawaian lainnya. Mengatur kesejahteraan staf sekolah.⁹

⁹Ibid., 92.

e. Bidang gedung dan perlengkapan sekolah.

Mengatur pemeliharaan kebersihan gedung serta seluruh sarana, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan sekolah, menyelenggarakan inventarisasi yang habis pakai maupun yg permanen.

f. Bidang peralatan pelajaran.

Mengatur buku-buku pelajaran untuk pegangan pendidik maupun peserta didik, mengatur perpustakaan, mengatur alat-alat pelajaran tiap bidang studi.

g. Bidang hubungan sekolah dan masyarakat.

Menyelenggarakan pembentukan dan secara berkelanjutan, menerima dan memberikan pelayanan pada tamu, mewakili sekolah dalam hubungan kerja dengan pihak luar.

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas pokok diatas, seorang kepala sekolah harus mampu melakukan pembagian dan pembedaan kerja dengan membentuk unit kerja yang nantinya melaksanakan pembagian tugas, sesuai dengan besar kecilnya sekolah yang dipimpinnya. Apabila kegiatan sudah dalam tahap pelaksanaan, kepala sekolah wajib menggerakkan setiap personal supaya bersedia dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas termasuk

dengan kepemimpinan yang memiliki fungsi administrasi mengarahkan, koordinasi dan pengawasan.¹⁰

Kepala sekolah harus memahami prinsip organisasi yang diterapkan di sekolah masing-masing supaya tugas-tugas tersebut berlangsung efektif.

4. Peran Kepala Sekolah

Terdapat tujuh peran kepala sekolah dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, yaitu:

a) Kepala sekolah sebagai edukator (pendidik)

Kepala sekolah perlu memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di sekolahnya, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga pendidik serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik.

Al-Ghazali merumuskan dalam pribadi seorang pendidik itu mengacu pada tiga sumber, yakni Al-Qur`an, Hadits serta fatwa. Menurutnya pendidik adalah mujahid fi sabilillah, cahaya bagi umat manusia sepanjang masa dan penyuluh hati.¹¹

b) Kepala sekolah sebagai manajer

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota organisasi serta pendayagunaan seluruh sumber daya

¹⁰Ibid., 93.

¹¹Ramayulis, samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam, Mengenal Tokoh Pendidikan di Dunia Islam dan Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press Group, 2005), 10-12.

organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c) Kepala sekolah sebagai administrator

Kepala sekolah sebagai administrator juga berkenaan dengan kemampuan mewujudkan penyusunan kelengkapan data administrasi pembelajaran, bimbingan dan konseling, kegiatan kurikulum, kegiatan di perpustakaan, data administrasi peserta didik, guru, pegawai dan lain sebagainya.

Administrasi sangat diperlukan karena kegiatan disekolah tidak terlepas dari pengelolaan yang bersifat pencatatan dan mendokumentasikan seluruh program sekolah.

d) Kepala sekolah sebagai supervisor

Kepala sekolah bertugas untuk mengarahkan perhatiannya pada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan.

e) Kepala sekolah sebagai pemimpin

Pentingnya peran kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi sehingga dapat dianggap berhasil tidaknya kegiatan organisasi, yang mana sebagian ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang yang ditunjuk dalam memimpin organisasi tersebut.¹²

¹²Burhanudin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 111.

f) Kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja

Iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya.

g) Kepala sekolah sebagai wirausahawan

Kepala sekolah harus mampu mencari, menemukan dan melaksanakan berbagai pembaharuan yang inovatif dengan menggunakan strategi yang tepat. Dengan sikap kewirausahawan, kepala sekolah akan berani melakukan perubahan yang inovatif di sekolah yang dipimpinnya.

Semakin kepala sekolah mampu mewujudkan peran-perannya ditas, maka secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi yang akan berefek pada peningkatan mutu lembaga pendidikan.

B. Pengertian Mutu

Pengertian mutu dapat dilihat dari tiga pakar mutu yang memiliki pandangan beragam diantaranya yaitu, *pertama*, Deming melihat masalah mutu hakikatnya terletak pada kesesuaian dengan kebutuhan konsumen. *Kedua*, Juran memiliki ide penting mengenai mutu, yaitu kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. *Ketiga*, Philip Crosby mengungkapkan pengertian mutu adalah gambaran

dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa sesuai dengan yang distandarkan.¹³

Pengertian mutu adalah keunggulan suatu produk baik berupa barang maupun jasa yang memuaskan, memenuhi keinginan pelanggan dan kebutuhan pelanggan, bersistem pencegahan, mempunyai standard tanpa cacat dan mempunyai ukuran harga ketidakpuasan.¹⁴ Pengertian mutu terdapat pada tiga unsur pokok, yaitu kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan *stakeholders*, pemenuhan janji yang diberikan.¹⁵

Mutu adalah kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa (*services*) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, kepuasan (*satisfaction*) pelanggan (*customers*) yang dalam pendidikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal *customer* dan eksternal. Internal *customer* yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar dan eksternal *customer* yaitu masyarakat dan dunia industri. Mutu tidak berdiri sendiri artinya banyak faktor untuk mencapainya dan untuk memelihara mutu.¹⁶

Sedangkan secara umum pengertian dari mutu pendidikan ialah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari

¹³Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 293.

¹⁴ Tony Bush, *Kepemimpinan Pendidikan*, (Yogyakarta : IRCISOD, 2006), 191.

¹⁵Mulyadi, *Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 38.

¹⁶Fatah Nanang, *Sistem Penjamin Mutu Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 2.

ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan.¹⁷

Istilah mutu dalam bahasa Inggris yaitu *quality*, yang berarti kualitas adalah suatu standar atau ukuran dari sesuatu yang ketika dibandingkan dengan hal lain yang sama. Mutu adalah derajat keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa yang nyata maupun tidak nyata.¹⁸ Jika dikaitkan dengan sebuah pendidikan maka yang dimaksud disini adalah lebih mengacu pada proses dan hasil pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, mutu mengacu pada masukan, proses dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. *Pertama*, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. *Kedua*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain. *Ketiga*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. *Keempat*, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita. Hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus

¹⁷Mulyasa, *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012),120.

¹⁸Ade Cahyana, "Upaya Peningkatan Mutu Sekolah Melalui Otonomi Satuan Pendidikan", (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan: Vol. 16, nomor 2, Maret 2010), 113.

untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternative baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori *effective school* yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini adalah :

- a. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
- b. Sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai.
- c. Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat.
- d. Adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah/warga sekolah.
- e. Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK.
- f. Adanya pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai aspek akademik dan administrative dan pemanfaatan hasilnya untuk perbaikan mutu.
- g. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat.¹⁹

Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian mutu dalam dunia pendidikan dapat diartikan sesuatu yang

¹⁹Ibid,..112

harus diperjuangkan, diraih dan dipertahankan oleh suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat menyekolahkan putra-putrinya di lembaga pendidikan tersebut.

1. Konsep Mutu

Edward Deming berpendapat meskipun kualitas mencakup kesesuaian atribut produk dengan tuntutan konsumen, namun kualitas lebih dari itu. Demming juga mengungkapkan bahwa permasalahan utama mutu atau kualitas secara mendasar memiliki kaitan dengan manajemen. Deming mengatakan terdapat 14 poin penting yang dapat menuntun pemimpin/manager mencapai perbaikan dalam kualitas, yaitu: 1) menciptakan kepastian tujuan perbaikan produk dan jasa, 2) mengadopsi filosofi baru dimana cacat tidak bias diterima, 3) berhenti tergantung pada inspeksi massal, 4) menghentikan praktek penghargaan atas dasar harga saja, 5) secara tetap dan berkelanjutan memperbaiki sistem produksi dan jasa, 6) mengadakan pelatihan kerja modern, 7) membentuk kepemimpinan, 8) menghilangkan ketakutan, 9) singkirkan penghalang antar departemen, 10) hilangkan/kurangi tujuan-tujuan, target jumlah pada pekerja, 11) hilangkan manajemen berdasarkan sasaran, 12) hilangkan rintangan yang merendahkan pekerja berdasarkan penilaian, 13) melembagakan program pendidikan dan pelatihan, 14) menciptakan

struktur dalam manajemen puncak yang dapat melaksanakan transformasi.²⁰

Deming mempopulerkan siklus manajemen yang menjadi acuan dalam kegiatan penjaminan mutu yaitu *plan, Do, Check, Action* (PDCA). Bertahap diawali dengan *plan* atau merancang perencanaan, *Do* atau kegiatan melaksanakan rencana, *Check* atau kegiatan evaluasi, *Action* atau tindak lanjut.²¹ Perencanaan meliputi penetapan standard, terutama yang memiliki kaitan dengan standard kinerja guru, pengalaman belajar, standard hasil peserta didik. Selanjutnya pelaksanaan yakni melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan standard kinerja agar peserta didik dapat mencapai pengalaman belajar dan hasil yang diharapkan. Kemudian evaluasi merupakan sebuah upaya pembandingan pelaksanaan proses dengan standard yang ditetapkan, apakah sudah sesuai atau terdapat beberapa kekurangan yang akan dilakukan kembali dalam tindakan/action yang berarti perbaikan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya.

2. Upaya Peningkatan Mutu

Bagi suatu lembaga pendidikan mutu merupakan suatu isu sentral yang perlu diperhatikan, menurut Ismail, penerapan manajemen mutu dalam dunia pendidikan memerlukan adanya pengelolaan yang baik dan

²⁰Mardan Umar dan Feiby Ismail, "Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam", *pendidikan Islam Iqra`*, 2 (2017), 18.

²¹Ibid.,18

professional, manajemen organisasi yang baik sehingga menghasilkan output yang bermutu dan berkualitas tinggi.²²

Terdapat suatu standard yang sudah ditentukan mengenai mutu dan kualitas pendidikan yang ada dalam standard nasional pendidikan. Standard nasional yang ditetapkan merupakan standard yang sudah dikaji dan dapat dicapai oleh setiap lembaga pendidikan di Indonesia. Penjaminan mutu harus terus dilakukan untuk mencapai standard nasional.

C. Adiwiyata

1. Sejarah Adiwiyata

Pada tahun 1996 disepakati kerjasama pertama antara Departemen pendidikan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup, yang diperbaharui pada tahun 2005 dan tahun 2010. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pada tahun 2005, pada tahun 2006 Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata, dimulai dilaksanakan di wilayah Pulau Jawa dengan melibatkan instansi pemerintah, perguruan tinggi dan LSM yang bergerak di bidang pendidikan lingkungan hidup.²³

Pelaksanaan program Adiwiyata merupakan amanah UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

²²Feiby Ismail, "Implementasi Total Quality Management (TQM) di Lembaga Pendidikan", *jurnal pendidikan Islam Iqra`*, 2 (2016) 26.

²³Kementerian Lingkungan Hidup, Panduan Adiwiyata. KLH. Jakarta, 20011.

tepatnya Pasal 65 butir (2) setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2009 adalah peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan Adiwiyata. Secara aturan atau dasar hukum pelaksanaan, program adiwiyata adalah seharusnya berjalan di semua sekolah.²⁴

2. Pengertian Adiwiyata

Adiwiyata memiliki pengertian sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 poin keempat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini berarti setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan sikap peduli untuk menjaga lingkungan.

Kata adiwiyata berasal dari dua kata “Adi” dan “Wiyata”. Adi memiliki makna besar, agung, baik, ideal atau sempurna. Wiyata adalah tempat dimana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan

²⁴Kementerian Negara Lingkungan Hidup, panduan Menteri Pendidikan Lingkungan Hidup. KNLH. Jakarta, 2008.

etika dalam kehidupan sosial, sebagai satu kata adiwiyata dapat disimpulkan tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang menjadi dasar manusia untuk menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju cita-cita pembangunan berkelanjutan.²⁵

Program adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program Adiwiyata diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.²⁶

Program adiwiyata adalah program yang komprehensif melibatkan semua warga sekolah, baik di sekolah maupun masyarakat diharapkan dapat turut serta dan membantu meningkatkan kepedulian lingkungan, khususnya para siswa. Adiwiyata merupakan sebuah nama program pendidikan lingkungan hidup yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan sebuah usaha peduli lingkungan, menekankan pemeliharaan lingkungan dengan melibatkan masyarakat.

Menurut kementerian lingkungan hidup dan kemendikbud, adiwiyata memiliki pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan

²⁵ Angga Swasdita Fridantara, "Implementasi Program Adiwiyata Di SMA Negeri 2 Klaten" (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 2015) 15.

²⁶ Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *Buku panduan Adiwiyata* (Wujudkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan), (KNLH, 2009), 5.

berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dari program adiwiyata yaitu untuk menciptakan sekolah yang baik dan ideal serta menjadi tempat pembelajaran bagi warga sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup juga pembangunan berkelanjutan. Sikap peduli lingkungan sangat penting ditanamkan dan dibiasakan khususnya pada peserta didik dan warga sekolah, dengan demikian akan tertanam rasa peduli lingkungan dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan hingga menjadi sebuah karakter demi keberlangsungan kehidupan, kepala sekolah dan seluruh staf sekolah juga memiliki peran sebagai contoh perilaku peduli lingkungan.

Dalam program adiwiyata diharapkan semua warga sekolah dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang buruk bagi lingkungan.

Pengimplementasian kebijakan pendidikan lingkungan hidup baik melalui pendidikan formal dan non formal diharapkan agar semua pihak dapat melaksanakan diantaranya:

- a. Mengembangkan kelembagaan pendidikan lingkungan hidup
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

- c. Pengembangan sarana dan prasarana
- d. Peningkatan dan efisiensi penggunaan anggaran
- e. Pengembangan materi lingkungan hidup
- f. Peningkatan komunikasi dan informasi
- g. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan
- h. Pengembangan metode pendidikan lingkungan hidup

3. Prinsip Dasar Program Adiwiyata

Pelaksanaan program adiwiyata diletakkan pada dua prinsip dasar berikut ini:

- 1) Partisipatif: komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran
- 2) Berkelanjutan: seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara berkelanjutan.

Adiwiyata memiliki tujuan menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah supaya menjadi tempat pembeajaran, sehingga kemudian nanti warga sekolah dapat turut bertanggung jawab dalam upaya pemeliharaan dan penyelamatan lingkungan hidup.

4. Tujuan program Adiwiyata

Tujuan mengikuti program Adiwiyata tidak lain salah satunya untuk menciptakan kondisi sekolah yang baik untuk menjadi tempat pembelajaran serta penyadaran warga sekolah supaya dikemudian hari

dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan utama diarahkan pada terwujudnya kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia.²⁷

Tujuan dari pendidikan lingkungan hidup adalah mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana, turut menciptakan pola perilaku baru yang bersahabat dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup dan memperbaiki kualitas hidup.²⁸

Secara khusus Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) memiliki 6 tujuan. Pertama, Kesadaran, yaitu memberi dorongan kepada setiap individu untuk memperoleh kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan masalahnya. Kedua, pengetahuan, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh berbagai pengalaman dan pemahaman dasar tentang lingkungan dan masalahnya. Ketiga, Sikap, yaitu membantu individu untuk memperoleh seperangkat nilai dan kemampuan mendapatkan pilihan yang tepat, serta mengembangkan perasaan yang peka terhadap lingkungan dan memberikan motivasi untuk berperan serta secara aktif dalam peningkatan dan perlindungan lingkungan. Keempat, Keterampilan,

²⁷“Apa itu Adiwiyata?”, *Jurnal Urip Santoso*, <http://uripsantoso.wordpress.com/2011/10/14/apa-itu-adiwiyata/14-10-2011>, diakses 10 September 2021.

²⁸Daryanto Agung Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Gaya Media, 2013), 21.

yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan lingkungan. Kelima, Partisipasi, yaitu memberikan motivasi kepada setiap individu untuk berperan serta secara aktif dalam pemecahan masalah lingkungan. Keenam, Evaluasi, yaitu mendorong setiap individu agar memiliki kemampuan evaluasi pengetahuan lingkungan ditinjau dari ekologi, social, ekonomi, politik dan faktor-faktor pendidikan.²⁹

5. Manfaat Program Adiwiyata

Menurut kementerian lingkungan hidup pelaksanaan program adiwiyata memiliki program manfaat adiwiyata yang sangat besar dan luas.

Berikut ini manfaat Sekolah Adiwiyata:

- a. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi berbagai sumber daya dan energi.
- b. Menciptakan kondisi belajar-mengajar yang nyaman dan kondusif bagi warga sekolah.
- c. Menjadikan tempat pembelajaran nilai-nilai PLH yang baik dan benar bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar.

²⁹Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup* .,12.

- d. Meningkatkan upaya berkonsep PLH melalui kegiatan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta melalui kegiatan pelestarian fungsi lingkungan sekolah.³⁰

6. Komponen Program Adiwiyata

Dalam mewujudkan program adiwiyata telah ditetapkan berbagai komponen yaitu:

- a) Kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.

Terdapat indikator kebijakan yang harus terus menerus diusahakan untuk dipenuhi, yakni pengembangan visi misi yang ada dalam dokumen bahwa adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selanjutnya visi misi tersebut akan diuraikan dalam rencana program kegiatan sekolah yang dapat dipahami seluruh warga sekolah.

Kebijakan sekolah merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Dengan kata lain, kebijakan tersebut perlu menjadi prioritas. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan sekolah yang memiliki kaitan dengan adiwiyata dapat terakomodir dengan baik.

- b) Kurikulum berbasis lingkungan

Model pembelajaran dan metode belajar yang bervariasi, dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang lingkungan

³⁰Endang Haris, dkk., *Sekolah Adiwiyata panduan implementasi Adiwiyata mandiri di sekolah*, (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 5.

hidup yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yang mana tema lingkungan hidup dapat menjadi kerangka utama dalam pengembangan dan penyusunan kurikulum berbasis lingkungan hidup.

c) Kegiatan berbasis partisipatif

Dalam rangka mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, maka warga sekolah perlu terlibat langsung dalam segala aktifitas pembelajaran lingkungan hidup. Pengertian dari partisipatif sendiri adalah keikutsertaan secara sukarela dalam melaksanakan kegiatan, dalam konteks ini berarti keikutsertaan dalam kegiatan yang terkait lingkungan hidup. Kegiatan yang dapat dilakukan berupa ekstrakurikuler, ikut serta kegiatan yang diadakan oleh pihak luar dan lain-lain.

d) Pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan.

Manajemen sarana prasarana adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan. Karena itu sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan menjadi syarat tambahan bagi Adiwiyata.